

ISSN 2087-3239

INFLASI

Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Vol. 2 No. 1 - Oktober 2011

Diterbitkan Oleh:

Program Studi Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Universitas Pattimura



Alamat Redaksi:

Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon

Jln. dr. Latumeten Kampus PPS Lt. 3

Email: jurnal.inflasi@mail.unpatti.ac.id

www: <http://paparisa.unpatti.ac.id/paperrepo>

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah)**

Oleh:
Zulkarim Salampessy
Politeknik Negeri Ambon

Abstract

This study aims to provide empirical evidence on the effect of the general allocation and revenue for Government Expenditures Central Maluku. This study used data revenue budget expenditures in 2005-2009, using simple and multiple linear regression. Simple regression analysis showed each separately, namely, the allocation of public funds and revenues significantly influence the shopping area. Statistically, comparing the value of R (R Square), and the value of t statistics, showing the influence of local revenue to shopping areas is stronger than general allocation. When these two factors simultaneously to Shopping diregres area, both also significant influences. Thus, in the regression model, it can be stated that the significance of the influence of local revenues to expenditures is stronger than the effect of the allocation of public funds to the shopping area.

Keywords: General Allocation Fund, Revenue, Expenditure, and Linear Regression.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, mengandung arti bahwa daerah diberi kesempatan untuk mandiri dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip pemerataan dan keadilan, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya.

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk bekerja keras menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah berupa sumber-sumber ekonomi yang nantinya diharapkan menjadi sumber penerimaan daerah atau pendapatan daerah dalam menyangga penyelenggaraan pemerintah daerah. Penerimaan daerah atau disebut pendapatan asli daerah adalah sumber penerimaan yang vital bagi pelaksanaan pemerintahan daerah. Karena, bila pendapatan asli daerah diupayakan menjadi tinggi, menunjukkan ada pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pasal 5 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2004, menjelaskan bahwa pendapatan daerah bersumber dari; pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (pasal 6 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004). Kemudian transfer dari pusat berupa dana perimbangan yang terdiri atas: Dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (pasal 10 ayat (1) UU no. 33 Tahun 2004).

Menurut Ismail (2001), diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Di samping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi kepada kebijakan proyek pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya berada di daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Adi (2006) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nanga (2005) dalam Adi (2006) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah – daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor – sektor yang produktif di daerah.

Wong (2004) dalam Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Mardiasmo (2002), mengungkapkan hal yang samabahwa, semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Pajak daerah dan retribusi daerah seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah. Perbedaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan perbedaan penerimaannya yang selanjutnya menghasilkan pula perbedaan belanjanya. Di sisi lain, perbedaan PAD antarpemerintah daerah tidak selalu merepresentasikan potensinya akibat persaingan pajak (*tax competition*) antardaerah. Demikian pula, perbedaan belanja antarpemerintah daerah tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyarakatnya akibat persaingan pengeluaran (*expenditures competition*). Dalam era perdagangan bebas, persaingan antarpemerintah daerah ini akan semakin kuat terutama dalam merebut peluang bisnis dalam menarik investasi.

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU dan DAK terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD.

Dalam Kuncoro (2007) Transfer antarpemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya (Fisher, 1996) dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Nemec dan Wright, 1997). Sayangnya, alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal (Naganathan dan Sivagnanam, 1999). Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat (Shah, 1994), bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999). Keadaan tersebut juga ditemui pada kasus pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. Data menunjukkan proporsi pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 persen.

Dalam Abdullah dan Halim (2003) Pada praktiknya, transfer dari Pemerintah pusat merupakan sumber dana utama Pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda "dilaporkan" di Perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar-pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002).

Menurut Hayani (2005), Dana Alokasi Umum yang merupakan subsidi yang diberikan pemerintah pusat pada daerah ternyata dapat dikatakan mempunyai pengaruh yang cukup besar pada belanja daerah, potensi dan tingkat pinjaman pada provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian yang sama juga oleh Sayang (2005), bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Beberapa penelitian di Indonesia yang pernah dilakukan, misalnya oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Harianto dan Adi (2007), Kuncoro (2007), kemudian Adi (2006) yang memfokuskan penelitian pada transfer pemerintah pusat, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Secara umum, bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan transfer pemerintah pusat (dalam hal ini DAU) mempunyai peranan dan pengaruh yang besar terhadap belanja pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) Apakah DAU mempengaruhi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah?; (2) Apakah PAD mempengaruhi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah?; (3) Apakah DAU dan PAD secara bersama-sama mempengaruhi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada: (1) Pengaruh DAU terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah; (2) Pengaruh PAD terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah; (3) Pengaruh DAU dan PAD secara bersamaan terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Dan beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: (1) Kontribusi empiris, untuk memperkuat penelitian sebelumnya, berkenaan transfer dana (DAU) dan PAD terhadap Belanja Daerah yang dilakukan secara empiris pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah; (2) Kontribusi kebijakan, memberikan masukan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD, serta UU dan PP yang menyertainya; (3) Kontribusi teori, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

KAJIAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Penelitian ini berupaya mengkaji pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah di kabupaten Maluku Tengah. Penelitian Abdullah dan Halim (2003) Pengaruh DAU, dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Bali, menghasilkan analisis bahwa ketika tidak digunakan tanpa *lag*, pengaruh PAD terhadap Belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan *lag*, pengaruh DAU terhadap Belanja daerah justru lebih kuat dari pada PAD. Hal ini berarti terjadi *flypaper effect* dalam respon Pemerintah daerah terhadap DAU dan PAD.

Sementara Maimunah (2006) meneliti tentang *Flypaper Effect*, DAU, dan PAD terhadap Belanja Daerah pada kabupaten kota di Pulau Sumatra. menghasilkan kesimpulan yaitu: *Pertama*, hasil pengujian dari hipotesis alternatif pertama dan kedua adalah diterima, artinya besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif). *Kedua*, hasil pengujian hipotesis alternatif ketiga yang tujuannya adalah untuk mengetahui terjadi tidaknya *flypaper effect*, juga diterima. Hal tersebut

membuktikan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera.

Ketiga, hasil pengujian hipotesis alternatif keempat yang tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh *flypaper effect* dalam memprediksi Belanja Daerah periode ke depan, juga diterima. *Keempat*, hasil pengujian hipotesis alternatif keempat yang merupakan hipotesis uji beda adalah tidak dapat diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota pulau Sumatera.

Kelima atau terakhir, hipotesis alternatif keenam berkaitan dengan belanja daerah sektor yang berhubungan langsung dengan publik yang terdiri atas tiga hipotesis alternatif. Hasil pengujian hipotesis alternatif enam bagian a adalah tidak dapat diterima, dengan kata lain tidak terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah bidang Pendidikan. Selanjutnya bagian b diterima, artinya telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah bidang Kesehatan. Hasil pengujian terakhir atau bagian c juga diterima, artinya Belanja Daerah bidang Pekerjaan Umum-pun terjadi *flypaper effect*.

Sayang (2005), Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur), menghasilkan analisis bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan permasalahan penelitian, tujuan penelitian dan kajianteoritis yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

H2: PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

H3: DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat peneliti melakukan penelitian adalah di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Dilihat dari tingkat explanasi, maka jenis penelitian ini adalah asosiatif didasarkan pada tingkat explanasi. Explanasi adalah variable-variabel yang diteliti akan menghasilkan obyek yang diteliti melalui data yang dikumpulkan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah dan variabel independen adalah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah.

Data yang diambil dari lokasi penelitian merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi anggaran APBD dengan fokus Kabupaten Maluku Tengah selama 5 tahun untuk periode 2005 – 2009 (*time series*). Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Pada penelitian ini, data-data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen dari basis data bagian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Hasil analisis adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Regresi sederhana dan berganda yang

digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian dalam membuktikan hipotesis dijabarkan dibawah ini dalam bentuk persamaan-persamaan, sebagai berikut:

Dalam Regresi sederhana, persamaan $Y_i = a + bx_i + e$, dimana Y adalah belanja daerah, a merupakan konstanta, b adalah koefisien regresi, X_i adalah DAU atau PAD dan e adalah error. Untuk regresi berganda, persamaan regresi $Y_i = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$. dimana Y adalah belanja daerah, a merupakan konstanta, X_1 adalah DAU dan b_1 adalah koefisien regresi DAU. X_2 adalah PAD dan b_2 adalah koefisien regresi PAD. e adalah error.

Analisis regresi merupakan analisis yang berkenaan dengan suatu studi ketergantungan antara variable yang dinamakan variable terikat (*dependent variable*) terhadap variable bebas (*independent variable*). Metode regresi linear berganda digunakan karena yang diteliti adalah pengaruh beberapa variable bebas terhadap variable terikat berdasarkan perkembangannya secara proporsional, dengan kata lain metode ini menunjukkan hubungan spesifik antara variable-variabel bebas dan terikat.

Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) maka akan digunakan statistik uji F dan t-test. Pengujian ini sering disebut pengujian signifikansi keseluruhan (*overall significance*) yaitu untuk melihat apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Ghazali (2009;17) jika F hitung > F tabel yaitu $F_{\alpha}(k-1, n-k)$, maka hipotesis nol di tolak. Di mana $F_{\alpha}(k-1, n-k)$ adalah nilai kritis F pada tingkat signifikansi α dan serajat bebas (df) pembilang (k-1) serta derajat bebas (df) penyebut (n-k).

Ghozali (2009;17), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Jika nilai hitung t > nilai t tabel $t_{\alpha}(n-k)$, maka H_0 di tolak yang berarti satu variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi

Regresi Sederhana: Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah (BD)

Pengujian untuk melihat pengaruh DAU terhadap BD dilakukan dengan meregres DAU dan BD untuk menguji hipotesis bahwa DAU mempengaruhi BD, Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari nilai *t-statistic* regresi tampak bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap BD (4,348 untuk DAU) dengan sig. 0,001 pada $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti bahwa semakin besar DAU, maka semakin besar pula BD. Dengan demikian, hipotesis pertama, yang menyatakan *DAU berpengaruh positif terhadap BD* tidak dapat ditolak, dan ini konsisten dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim (2003) dan Mutmainah (2006).

Tabel 1. Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Regresi Sederhana: $BD = 6.376E10 + 0,874DAU$
Sig. = 0,001 <i>t</i> -statistic = 4,348* F- statistic = 18,902 R (R ²) = 0,770 (0,592) Adjusted-R ² = 0,561
Keterangan: * signifikan pada α = 5%.

Sumber: Lampiran 2, (diolah, 2011).

Regresi Sederhana: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD)

Cara yang sama dilakukan pula pada model regresi kedua. Tabel 2 menunjukkan hasil regresi PAD terhadap BD. Analisis dilakukan dengan meregres PAD dan BD untuk menguji hipotesis dua (H2) bahwa PAD mempengaruhi BD.

Tabel 2. Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Regresi Sederhana: $BD = 2.575E10 + 5,574PAD$
Sig. = 0,000 <i>t</i> -statistic = 5,657* F- statistic = 31,996 R (R ²) = 0,843 (0,711) Adjusted-R ² = 0,689
Keterangan: * signifikan pada α = 5%.

Sumber: Lampiran 3, (diolah, 2011).

Nilai *t*-statistic variabel PAD adalah 5,657, signifikan pada derajat signifikansi α = 5%. Dengan demikian, hipotesis 2 yang berbunyi: PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah tidak dapat ditolak (Sig. = 0,000). Artinya, semakin besar perolehan PAD, maka semakin besar pula belanja daerah, dan ini konsisten dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim (2003) dan Mutmainah (2006).

Regresi Sederhana: Komparasi Daya Prediksi DAU dan PAD terhadap BD

Pembandingan pengaruh DAU dengan PAD terhadap BD. Pada regresi sederhana, PAD mempunyai pengaruh lebih besar daripada DAU, yang dapat dilihat dari koefisien regresi PAD(5,574) yang lebih tinggi dari koefisien regresi DAU (0,874), dan nilai *t*-statistic untuk PAD(5,657) lebih besar dari DAU(4,348). Demikian pula untuk nilai R,R² dan Adjusted-R², di mana PAD lebih besar dari DAU.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan regresi sederhana, PAD dapat memprediksi BD lebih baik daripada DAU. Hal ini berarti bahwa secara statistik tidak terjadi *flypaper effect*, yaitu respon Pemerintah daerah terhadap perubahan PAD lebih besar daripada terhadap perubahan DAU. Untuk mengkonfirmasi temuan ini, pada bagian lain dilakukan uji serentak kedua variabel (DAU dan PAD) terhadap BD.

Regresi Berganda: Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Daerah

Pengujian atas pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja daerah dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap belanja daerah dan mana yang lebih dominan. Sebagaimana telah didiskusikan diawal bahwa transfer atau *grants* atau DAU dan pendapatan asli daerah secara terpisah berpengaruh terhadap belanja daerah (seperti juga ditemukan dalam studi ini dan telah dijelaskan di muka). Studi ini *me-run* kedua variabel pendapatan tersebut secara serentak sehingga dapat dibandingkan signifikansi pengaruh keduanya terhadap belanja daerah. Hasil yang akan diperoleh bisa menunjukkan kemungkinan terjadi atau tidaknya *flypaper effect*. Untuk dapat dikatakan telah terjadi *flypaper effect* maka hasil yang diperoleh haruslah menunjukkan bahwa pertama, nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD dan keduanya signifikan. Kedua, PAD tidak signifikan.

Tabel 3. Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah

Regresi Berganda: $BD = 3.336E10 - 2,142DAU + 100,972PAD$		
<i>t</i> -statistic	-2,782*	3,980*
Sig. =0,000	<i>F</i> -statistic = 28,162	
<i>R</i> (<i>R</i> ²) = 0,908 (0,824)		<i>Adjusted-R</i> ² = 0,795
Keterangan: *signifikan pada $\alpha = 5\%$.		

Sumber: Lampiran 4, (diolah, 2011).

Berdasarkan table 3 di atas, hasil yang didapat adalah Nilai *t*-statistic untuk kedua variabel mengalami penurunan dibandingkan dengan analisis regresi sederhana dengan variabel bebas tunggal (DAU atau PAD). Ketika DAU dan PAD masing-masing diregres dengan BD, maka nilai *t*-statistic untuk keduanya adalah 4,348 dan 5,657 (untuk PAD lebih besar dari DAU). Sementara ketika keduanya diregres serentak terhadap BD, nilai *t*-statistic untuk PAD (3,980) tetap lebih besar dari DAU (-2,782). Nilai *t*-statistic mengalami penurunan sebesar 7,13 untuk DAU dan 1,677 untuk PAD. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa signifikansi pengaruh PAD terhadap BD (secara statistik) lebih kuat daripada pengaruh DAU, atau tidak terjadi *flypaper effect*. Dengan demikian hipotesis tiga (H3) yang menyatakan pengaruh DAU terhadap BD lebih besar dari pada pengaruh PAD terhadap BD ditolak. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim (2003).

KESIMPULAN

Studi ini menganalisis pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Maluku Tengah. Penerimaan daerah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari DAU dan PAD, sementara Belanja Daerah adalah jumlah total pengeluaran daerah

selama satu tahun anggaran yang terdapat dalam Laporan APBD Kabupaten Maluku Tengah.

Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan masing-masing secara terpisah yaitu, DAU maupun PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah. Secara statistik, perbandingan nilai R (R Square), dan nilai t statistik, menunjukkan pengaruh PAD terhadap Belanja daerah lebih kuat daripada DAU. Hal ini berarti adanya kemungkinan tidak terjadi *flypaper effect* dalam respon Pemerintah daerah terhadap DAU dan PAD. Ketika kedua faktor (DAU dan PAD) diregres serentak terhadap Belanja daerah, pengaruh keduanya juga signifikan. Dengan demikian, dalam model regresi, dapat dinyatakan bahwa signifikansi pengaruh PAD terhadap BD lebih kuat daripada pengaruh DAU terhadap BD, atau tidak terjadi *flypaper effect*.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah dikemukakan pada kesimpulan di atas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah diharapkan siap dalam menyusun belanja daerah, artinya belanja daerah disusun berdasarkan pendapatan asli daerah.
2. Berkaitan dana transfer dari pemerintah pusat, maka pemerintah pusat seharusnya menyampaikan APBN dan kepres DAU jauh sebelum tahun berjalan sehingga memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyusun APBD dengan lebih baik.

REFERENSI

- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, 1-21.
- Abdullah, Sukrydan Halim, Abdul. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1140-1159
- Bastian. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Darwanto, dan Yustikasai, yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1-25
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika; Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. Anggaran daerah dan "fiscal stress" (sebuah studi kasus pada Anggaran daerah provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16 (4): 346-357
- _____. 2002a. Analisis varian pendapatan asli daerah dalam laporan

- perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. *Disertasi*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada,
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)*, Salemba Empat, Jakarta
- Hariato, David dan Adi, priyo Hari. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1-26
- Hayani, F. Etika. 2005. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah, Potensi Daerah, Tingkat Pembiayaan Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Selatan). *Tesis*. Tidak dipublikasi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Huda, Ni'matul. 2005. Otonomi Daerah: Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ibrahim, Jimmi Mohamad. 1997. *Prospek Otonomi Daerah Dalam Rangka Memberikan Peranan Yang lebih Besar Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II*. Dahara Prize. Jakarta.
- Insukindro dkk. 1994. *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*. Buku I. KKD FE UGM
- Ismail, Munawar. 2001. Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah. *TEMA. Volume II, Nomor 1, Maret* : 63-75.
- Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1-29
- Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, 1-27
- Mardiasmo. 2001. "Manajemen Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, & Bentuk dan Struktur APBD 2001", *makalah workshop Pembekalan Penyusunan Propeda Kabupaten/Kota PropensiNTB*, Kerjasama antara SIAGA Project dan Bappeda Mataram
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Mashun dkk. 2007. *Akuntansi Sektor Publik. BPFE*. Yogyakarta
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- _____. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- _____. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
- Rumagit, Merry C. N. 2008. Peran Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Tesis*. Tidak dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya.

- Sarundajang. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Sayang, Sabulon. 2005. Pengaruh dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Tesis*. Tidak dipublikasi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sriningsih, Siti. 2008. Dampak Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pemerataan Fiskal Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. *Tesis*. Tidak dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Indonesia.